

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



GUBERNUR BALI DAN MASYARAKAT TABUR BUNGA BAGI KRU KRI NANGGALA



KOTA DENPASAR JADI
PERCONTOHAN ETLE DI BALI

Hal. 4

BADUNG MULAI
PERCONTOHAN
PEMBELAJARAN
TATAP MUKA
PADA MEI

Hal. 8



WAKIL BUPATI
ANTARANEWS

HAL
3

Bali Perketat Dokumen Perjalanan di Pintu Masuk

Pemerintah Provinsi Bali akan memperketat pengawasan untuk pemeriksaan dokumen perjalanan di pintu-pintu masuk dan keluar Pulau Dewata terkait larangan mudik saat Lebaran 2021.

"Untuk lebih mengefektifkan pengecekan dokumen, nanti akan dilakukan penebalan personel di pintu-pintu masuk dan keluar Bali," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Made Rentin di Denpasar, Kamis.

Menurut Rentin, mengikuti ketentuan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali juga melarang mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat pada Lebaran 2021.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali itu menambahkan ada sejumlah hal yang dikecualikan, seperti keluarga yang meninggal dunia atau sakit keras di kampung halaman.

"Ada beberapa hal yang dikecualikan seperti kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda, misalnya ada keluarga, bapak, ibu,



yang meninggal dunia sementara kita berada di rantau," ucap Rentin.

Rentin mengatakan jika masyarakat mengalami kondisi ada keluarga sakit keras atau meninggal seperti itu, masyarakat dapat membawa surat keterangan dari lurah, kepala desa, atau Satgas COVID-19.

"Atau bisa membawa surat keterangan dari rumah sakit tempat keluarga dirawat yang menyatakan keluarganya sedang dirawat sakit keras atau meninggal," ucapnya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga diwajibkan membawa surat keterangan bebas COVID-19 berbasis PCR, antigen, atau GeNose.

Pemberlakuan ini tidak hanya berlaku untuk perjalanan darat melalui pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai, namun juga lewat udara melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Terkait larangan mudik, Pemprov Bali tidak akan membuat surat edaran khusus, tetapi pada prinsipnya mengikuti Surat Edaran dari Pusat.

Mudik lebaran Idul Fitri 2021 resmi dilarang oleh pemerintah mulai 6 hingga 17 Mei 2021 untuk menekan penyebaran COVID-19. (ant)

Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Made Rentin (Antaranews Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

Pemprov Bali Adakan Sensus Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal Desa Adat



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali Gede Pramana (ANTARA/HO-Pemprov Bali)

PEMERINTAH Provinsi Bali akan mengadakan sensus kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada di tiap-tiap desa adat melalui kegiatan Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat.

"Dengan sensus ini sekaligus dalam upaya untuk mengem-

bangkan dan memberdayakan desa adat yang lekat dengan nilai-nilai kebudayaan Bali," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali Gede Pramana di Denpasar, Jumat.

Dia menambahkan sensus dilaksanakan berdasarkan UU No

23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6/2014 tentang Desa dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

"Hal ini dilatarbelakangi bahwa desa adat memiliki wilayah, hak asal usul, hak-hak tradisional, susunan asli, serta otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri," ucapnya saat menyosialisasikan sensus itu kepada para bendesa adat di Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Kota Denpasar secara virtual.

Ia menjelaskan pembangunan Bali mencakup tiga aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sat Kerthi. Pelaksanaan sensus menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan potensi desa adat.

Sensus Sat Kerthi Semesta Bali mencakup pendataan

parahyangan (antara lain pura, benda sakral), palemahan (antara lain sumber daya alam, akomodasi, fasilitas pendidikan, kesehatan) dan pawongan (antara lain warga, sulinggih, tenaga kerja) pada 1.493 desa adat di Bali, yang nantinya untuk mengetahui ketersediaan sistem dan basis data sumber daya desa adat.

Hasil pendataan sensus akan tersaji dalam bentuk dashboard monitoring dan terintegrasi dalam peta digital Provinsi Bali yang dapat diakses di :<https://sensusadat.baliprov.go.id>, <https://sso.baliprov.go.id>, <https://sikuat.baliprov.go.id>

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali I Made Gunaja menambahkan saat pendataan di lapangan agar instrumen manual diisi terlebih dahulu sebelum menginput ke aplikasi sensus, hal ini untuk meminimalisasi kesalahan dan koreksi. (ant)

Gubernur Bali dan Masyarakat Tabur Bunga bagi Kru KRI Nanggala

GOVERNUR Bali Wayan Koster beserta beberapa pejabat daerah dan warga menggelar acara tabur bunga bagi 53 kru KRI Nanggala-402 yang gugur dalam penugasan di perairan utara Bali.

"Hari ini melakukan doa dan tabur bunga atas gugurnya prajurit terbaik KRI Nanggala-402 yang mengalami 'subsunk' atau tenggelam dalam penugasan di perairan utara Bali," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat ditemui di Pelabuhan Lalang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kegiatan tabur bunga ini dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada seluruh prajurit kapal selam KRI Nanggala-402.

"Tabur Bunga dilakukan untuk memberikan penghormatan atas dedikasinya menjaga

kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga dapat memberikan penghormatan kepada 53 orang prajurit sebagai patriot bangsa yang telah dinyatakan gugur di kapal KRI yang tenggelam dan ditemukan pada Minggu (25/04).

"Semoga amal baktinya diterima Tuhan dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi kejadian ini," katanya.

Selain tabur bunga, juga ada kegiatan menghanyutkan karangan bunga yang sejumlah 53 sesuai dengan jumlah kru KRI Nanggala-402.

Sebelumnya, pada Minggu (25/04) Panglima TNI Marsekal



Proses menghanyutkan karangan bunga oleh pejabat daerah Bali, di Pelabuhan Lalang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin (26/04/2021). ANTARA/Ayu Khania Pranisitha. (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2021)

Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa 53 prajurit terbaik yang berada dalam KRI Nanggala-402 telah gugur dan dinyatakan masuk fase subsunk atau tenggelam pada kedalaman 838 meter dibawah permukaan laut.

Ia mengatakan bahwa KRI Nanggala-402 yang gugur diperkuat dengan penemuan bukti-bukti otentik berupa bagian kapal selam setelah dilakukan pemindaian secara akurat. (ant)

Wakil Gubernur: 600 ribu Warga Bali Sudah Di-vaksin COVID-19



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menyerahkan sertifikat vaksinasi COVID-19 kepada pekerja perbankan peserta vaksinasi. (ANTARA/HO-Pemprov Bali)

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan bahwa sekitar 600 ribu warga Bali sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19.

"Dari rasio jumlah penduduk sebanyak 4,32 juta jiwa, Bali tercatat sebagai provinsi dengan capaian tertinggi dalam program

vaksinasi COVID-19," katanya saat menghadiri kegiatan vaksinasi pekerja perbankan di Kantor Cabang BRI Renon di Denpasar, Sabtu.

Pemerintah Provinsi Bali, menurut dia, mengencakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna meningkatkan kekebalan

warga terhadap penyakit tersebut menyusul rencana pembukaan kembali pariwisata Bali pada Juli mendatang.

"Tim UNESCO yang berkunjung dua minggu lalu sangat puas melihat langkah-langkah yang kita lakukan dalam penanganan COVID-19," kata Wakil Gubernur, yang biasa disapa Cok Ace.

Ia menambahkan, Organisasi Kesehatan Dunia juga menjajaki kemungkinan menggelar rapat tahunan di Bali pada Juni mendatang.

"Pemerintah pusat tengah serius melakukan pendekatan. Bila terlaksana, hal ini tentu akan berdampak baik bagi Bali," katanya.

Gubernur juga mengatakan bahwa pekerja perbankan termasuk pekerja sektor pelayanan publik yang menjadi sasaran vaksinasi dan mengapresiasi dukungan perbankan terhadap program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kepala Kantor Perwakilan

Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan bahwa sebagian besar pekerja perbankan di wilayah Bali telah mendapat suntikan vaksin COVID-19.

"Bahkan untuk wilayah Jembrana dan Klungkung seluruh pekerja perbankan telah divaksin. Menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin, kami berharap vaksinasi bagi pekerja perbankan rampung dalam waktu dekat," kata Trisno.

Wakil Pimpinan Wilayah BRI Denpasar Ketut Manuarta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang membantu vaksinasi COVID-19 pada pekerja perbankan.

Jumlah pekerja BRI wilayah Bali total 3.709 orang dan 1.383 orang di antaranya telah menjalani vaksinasi.

Di bawah koordinasi BI, vaksinasi juga dilakukan pada pekerja bank yang lain di wilayah Denpasar. (ant)

Kota Denpasar Jadi percontohan ETLE di Bali

Kota Denpasar akan menjadi percontohan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sistem tilang elektronik di Provinsi Bali, kata Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombes Pol. Indra di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan saat bertatap muka dengan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Denpasar bahwa sistem ETLE sangat penting karena menjadi program prioritas dan kebijakan pimpinan mengikuti perkembangan zaman dalam memanfaatkan teknologi.

Kehadiran tilang elektronik ini juga untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Ia mengatakan penerapan tilang elektronik bertujuan masyarakat bisa lebih tertib dan waspada karena ETLE dapat memantau perilaku pengendara dan mengetahui siapa yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

"Pelanggar lalu lintas di titik yang terpasang kamera CCTV langsung tertangkap gambarnya dan pelanggar tidak berinteraksi lagi dengan anggota polisi di lapa-



ngan," ujar Indra.

Untuk tahap pertama, kata Indra, pihaknya telah memasang CCTV pada satu titik yakni di Simpang Buagan. CCTV ini bisa merekam pelanggaran termasuk merekam plat nomor kendaraan, fisik bahkan wajah pengendara. Data yang telah di-"capture" akan diintegrasikan dengan data di kantor Samsat untuk mengetahui alamat yang bersangkutan.

Berdasarkan plat nomor kendaraan akan diketahui siapa yang melakukan pelanggaran. Setelah itu nantinya akan keluar surat tilang dan akan dikirim langsung ke alamat rumah pemiliknya dalam kurun waktu satu atau dua hari setelah melakukan pelanggaran.

Selanjutnya pelanggar melakukan verifikasi kapan bisa mengikuti proses sidang dan langsung membayar pelanggaran. Jika tidak membayar secara otomatis akan



Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombes Pol. Indra (kiri) saat bertatap muka dengan Wali Kota Jaya Negara yang menyatakan Kota Denpasar jadi percontohan penerapan ETLE di Bali. (Foto ANTARA/I Komang Suparta/Ist/2021)

diblokir dan diketahui saat proses bayar pajak di samsat setiap tahunnya.

"Untuk mempercepat kami telah membuat aplikasi dan bisa di akses melalui smartphone agar pemilik showroom bisa melihat apakah kendaraan tersebut melakukan pelanggaran," ucapnya.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada Polda Bali karena telah memilih Kota Denpasar

sebagai contoh penerapan ETLE atau sistem tilang elektronik ini.

Menurut Jaya Negara program ini sangat bagus untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Dengan adanya tilang elektronik masyarakat bisa lebih tertib dan waspada. Untuk mensukseskan program ini Jaya Negara mengaku Pemerintah Kota Denpasar akan turut membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. (ant)

Tim Yustisi Denpasar Awasi PPKM Skala Mikro



Tim Yustisi Denpasar awasi PPKM skala mikro saat COVID-19 (Foto ANTARA/I Komang Suparta/Ist/2021)

TIM Yustisi Kota Denpasar, Provinsi Bali melakukan kegiatan pengawasan protokol kesehatan secara gencar pada pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di kota

setempat dalam upaya menekan pandemi COVID-19.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga di Denpasar, Kamis, mengatakan pada

kegiatan kali ini berhasil menjerang 15 orang pelanggar protokol kesehatan.

"Dalam kegiatan ini kami bersama unsur TNI, Polri, Disnas Perhubungan dan personel Satpol PP," kata Dewa Sayoga.

Ia mengatakan bahwa dari 15 orang pelanggar tersebut, sebanyak delapan orang diberikan sanksi denda administratif sebesar Rp100 ribu per orang karena tidak menggunakan masker, dan tujuh orang diberikan pembinaan karena menggunakan masker tidak benar.

Dewa Sayoga mengatakan seperti pelanggar sebelumnya, kali ini pihaknya juga memberikan sanksi kepada pelanggar dengan sanksi fisik (push up) di tempat dan harus menandatangani surat pernyataan tidak melanggar kembali.

"Sanksi itu diberikan supaya di kemudian hari warga tersebut

kembali ditemukan melanggar, maka mereka siap menerima tindakan secara tegas," ucapnya.

Menurut Dewa Sayoga, masih saja ditemukan warga yang melanggar prokes, padahal pihaknya setiap hari telah memberikan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.

Untuk kebaikan kita semua, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan 6 M, yakni memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan.

Dengan cara itu, kata dia, diharapkan penularan COVID-19 dapat terkendali. Selain itu, di Kota Denpasar masih terjadi kasus positif COVID-19, kemudian fasilitas dan tenaga kesehatan sangat terbatas. (ant)

Pemkot Denpasar Gencar Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia

PEMERINTAH Kota Denpasar gencar melakukan optimalisasi program vaksinasi COVID-19 yang diutamakan untuk warga lanjut usia dalam upaya tercapainya Provinsi Bali menjadi zona hijau.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Rabu melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan dan Banjar Meranggi, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. Peninjauan ini dilaksanakan guna memastikan kelancaran serta optimalisasi target vaksinasi COVID-19 di Kota Denpasar khususnya para lanjut usia atau lansia.

Arya Wibawa menyampaikan bahwa lansia tidak perlu takut melakukan vaksinasi karena sebelum dilakukan vaksinasi ada tahapan "screening". Lansia termasuk yang menjadi prioritas karena memiliki dampak risiko



tinggi dan kematian. Sehingga pelaksanaan vaksin berbasis banjar akan terus kami lakukan demi terwujudnya "herd immunity" di Kota Denpasar.

"Pemkot Denpasar terus berupaya memenuhi cakupan vaksinasi lansia, serta bersama Satgas Penanganan COVID-19 akan selalu meyakinkan bahwa pelaksanaan vaksinasi aman untuk para lansia. Selain itu, dengan adanya vaksinasi berbasis banjar akan memudahkan dan mendekatkan pelayanan vaksinasi tersebut," ujar Arya Wibawa.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini mengatakan bahwa prosedur spesifik dan berbeda untuk melakukan vaksinasi kepada lansia.

"Untuk tekanan darah dan suhu sama dengan kategori lain, yaitu tekanan darah tidak lebih dari 180/110 mmHG dan suhunya



Pemkot Denpasar gencar vaksinasi COVID-19 sasar lansia. ANTARA/I Komang Suparta/Ist/2021

maksimal 37,5 derajat celsius. Prosedur spesifik untuk lansia adalah berupa pertanyaan tambahan terkait dengan kondisi fisik sebelum dilakukan penyuntikan," ujar Sri Armini.

Ia mengatakan pertanyaan yang diajukan pada meja registrasi di antaranya kondisi fisik dan me-

iliki penyakit bawaan. Sehingga yang mendapatkan vaksinasi kondisinya dalam keadaan sehat.

"Vaksinasi untuk kali ini menasar target 460 orang dengan rincian 350 orang di Kelurahan Serangan dan 110 orang di Kecamatan Denpasar Timur," katanya. (ant)

Diskes Denpasar Targetkan 8.000 Warga Renon Divaksinasi COVID-19



Sejumlah orang mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dilakukan Diskes Denpasar di Kelurahan Renon. (ANTARA/I Komang Suparta/Ist)

DINAS Kesehatan Kota Denpasar, Provinsi Bali menargetkan vaksinasi COVID-19 secara massal di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 8.000 orang.

"Kami menargetkan vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Renon, Kota Denpasar sebanyak 8.000 orang. Kegiatan tersebut di

mulai Senin (26/4) hingga Jumat (30/4), karena kelurahan tersebut sebagai status penyangga zona hijau kawasan wisata Sanur," kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan upaya tersebut tidak lepas dari letak geografis

Kelurahan Renon yang berbatasan langsung dengan objek wisata Sanur, sehingga dengan pelaksanaan vaksinasi massal dapat secara berkesinambungan guna mencegah penularan COVID-19.

Sri Armini menjelaskan 8.000 masyarakat menjadi target vaksinasi massal di Kelurahan Renon. Angka tersebut meliputi masyarakat yang memiliki KTP-elektronik Kelurahan Renon, masyarakat yang beraktivitas di Kelurahan Renon, serta masyarakat yang bekerja di wilayah Kelurahan Renon.

"Sasaran adalah penduduk tetap dengan KTP-el Renon, masyarakat yang ber-KTP Denpasar atau luar Kota Denpasar yang memiliki STLD atau keterangan domisili, atau masyarakat yang bekerja dengan menunjukkan surat keterangan bekerja," ucapnya.

Ia mengatakan secara teknis terdapat empat titik pelaksanaan

vaksinasi di Kelurahan Renon, yakni Wantilan Sewaka Prema Renon, Banjar (Dusun) Adat Pande Renon, Banjar Adat Peken Renon, dan Banjar Kelod Renon.

"Masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas dengan catatan tidak sedang hamil dan menyusui dapat mengikuti vaksinasi dengan melengkapi persyaratan administrasi di atas," ujarnya.

Pelaksanaan vaksinasi massal yang menasar 8.000 masyarakat Kelurahan Renon ini menggunakan jenis vaksin yang sama dengan di wilayah Sanur, yakni Astra Zeneca.

"Vaksinasi COVID-19 ini merupakan langkah pencegahan penularan virus corona untuk membentuk antibodi, sehingga mendukung percepatan penanganan COVID-19 dapat dimaksimalkan. Walaupun mendapatkan vaksinasi kami harapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Sri Armini. (ant)

Pemkab Badung Apresiasi Kinerja KPU-Bawaslu

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas kinerja Bawaslu Provinsi Bali maupun Kabupaten Badung serta KPU Badung beserta jajarannya dalam menyelesaikan tahapan pelaksanaan Pilkada Badung tahun 2020.

"Kami berterima kasih kepada jajaran Bawaslu baik Provinsi maupun Badung, KPU kabupaten beserta jajaran dan juga seluruh pihak lainnya dan masyarakat yang telah mensukseskan semua tahapan Pilkada Badung tahun 2020 secara aman, damai, lancar dan tentunya sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Bupati I Nyoman Giri Prasta saat menerima audiensi Bawaslu dan KPU Provinsi Bali didampingi KPU Kabupaten Badung di Badung, Senin.

Ia mengatakan, pada Pilkada Badung tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung sebanyak 84.62 persen yang merupakan angka partisipasi tertinggi selama kurun waktu 15

tahun terakhir.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari upaya bersama untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Meskipun begitu, Bupati Giri Prasta juga tetap meminta kepada pihak Bawaslu dan KPU beserta jajarannya untuk senantiasa berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menggandeng partai politik.

"Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkualitas khususnya di wilayah Kabupaten Badung," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Badung yang telah mendukung tugas Bawaslu dalam



Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta (kanan). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Pilkada Badung tahun 2020.

"Terima kasih juga kepada Bupati Giri Prasta yang telah berkenan menerima audiensi Bawaslu Provinsi Bali dalam rangka penyerahan laporan akhir (komprehensif) pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020 yang telah berjalan dengan lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak," katanya.

Sedangkan Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Lidartawan

didampingi Ketua KPU Badung Wayan Semara Cipta beserta jajaran menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat Badung dalam mensukseskan pilkada tahun 2020.

Menurutnya, berkat dukungan semua pihak serta berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Badung mencapai angka di atas 80 persen. (adv)

Vaksinasi COVID-19 "Drive Thru" di Kuta Sasar 2.000 Penerima



Vaksinasi COVID-19 drive thru di Kuta, Badung, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

PELAKSANAAN vaksinasi COVID-19 dengan sistem drive thru di wilayah Kuta, Bali, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Badung berkolaborasi dengan Halodoc dan Waterbom Bali menyasar 2.000 orang penerima dalam empat hari pelaksanaan.

"Kami fokuskan vaksinasi drive thru ini di kawasan Kuta, mengingat di kawasan ini sirkulasi kendaraan-padaannya padat, sehingga warga Badung lebih mudah menjalani vaksinasi dengan fasilitas ini," kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Badung, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksanaan vaksinasi, baik secara reguler maupun drive thru termasuk di area wisata Kuta sebagai bentuk kesiapan Pemkab Badung dalam menyambut pembukaan pariwisata yang direncanakan pada Juni-Juli mendatang.

Keuntungan vaksinasi drive thru ini, katanya, satu mobil bisa melakukan vaksin empat orang dan satu motor bisa dua orang, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi. "Ini wujud pelayanan kami untuk membantu dan memperluas green zone di wilayah Badung," katanya.

Bupati Giri Prasta mengaku pihaknya terus fokus melaksanakan vaksinasi di Kuta, karena wilayah itu merupakan pintu masuk tamu domestik dan mancanegara melalui transportasi udara.

Ia menargetkan pekan depan

vaksinasi kepada masyarakat Kuta sebagai kawasan penyangga zona hijau COVID-19 juga harus sudah selesai.

"Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Badung atas partisipasinya dalam menyukseskan program vaksinasi secara tuntas dan baik. Saya juga berterima kasih kepada relawan vaksin yang digerakkan Dinkes," ucapnya.

Sementara itu, Vice President Government Relations & Corporate Affairs Halodoc Adeline Hindarto mengaku senang dapat membantu Pemkab Badung dalam menghadirkan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 secara drive thru.

"Ini untuk memberikan akses vaksinasi yang aman dan praktis dengan menyasar target prioritas baru, yaitu pelaku pariwisata sehingga dapat menjadi awal pemulihan ekonomi melalui program wisata aman di Bali," katanya. (adv)

Duta Besar Ethiopia Kunjungi Kabupaten Badung-Bali

DUTA Besar Ethiopia untuk Indonesia, Admasu Tsegaye bersama rombongan melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Badung, Bali dan melakukan diskusi dengan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.

"Kunjungan ini kami lakukan dalam rangka pembahasan diskusi situasi terkini masa pandemi COVID-19 di Bali, khususnya di Kabupaten Badung," ujar Dubes Admasu Tsegaye dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.

Melalui pertemuan tersebut, pihaknya berharap nantinya bisa menjalin kerja sama dan saling bertukar pengalaman serta mempromosikan sektor pariwisata yang ada di wilayah masing-masing baik di Ethiopia maupun di Pulau Dewata.

Admasu Tsegaye juga memperkenalkan dan menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki

kawasan Afrika, diantaranya wisata alam liar, pemandian air panas, tempat-tempat bersejarah dan sebagainya.

"Selama ini masih banyak masyarakat yang mengenal Afrika sebagai wilayah yang tidak potensial. Padahal ada banyak peluang investasi dan kerja sama yang bisa dilakukan salah satunya investasi pariwisata dan perdagangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, ia mengapresiasi dan terima kasih banyak atas kunjungan dan kehadiran Dubes Ethiopia di Kabupaten Badung.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan kondisi sektor pariwisata dan ekonomi di Badung yang sangat terdampak pandemi COVID-19 karena sebagian besar pendapatan daerah Badung bergantung pada sektor pariwisata.

Untuk memulihkan sektor



Wabup Badung I Ketut Suiasa (kiri) dan Duta Besar Ethiopia Admasu Tsegaye. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

ekonomi, Kabupaten Badung telah melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan zona hijau di Badung seperti melaksanakan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat.

"Dengan vaksinasi terhadap masyarakat, kami berharap

mudah-mudahan bulan Juli mendatang pariwisata sudah bisa dibuka dan pandemi COVID-19 segera berakhir, ekonomi kembali pulih sehingga kerja sama yang akan terjalin nantinya bisa berjalan dengan baik," ungkap Ketut Suiasa. (adv)

Pemkab Badung Raih Penghargaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa (kanan). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) atas kinerja tahun 2020 dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

"Capaian ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada Badung yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di

Mangupura, Sabtu.

Untuk SAKIP tahun 2020, Pemkab Badung berhasil meraih predikat BB atau kategori baik dengan nilai 78,07 yang meningkat dari capaian nilai SAKIP Tahun 2019 yaitu 77,90. Sedangkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indeks 72,78 atau predikat BB.

Menurut Sekda Adi Arnawa, melalui capaian itu, pihaknya mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat tetap meningkatkan kinerja.

"Kami berharap kepada seluruh OPD, agar momentum ini bisa dijadikan untuk tetap meningkatkan kinerja kami bersama demi Badung," katanya.

Ia menambahkan, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa walaupun dalam pandemi COVID-19, semangat kinerja yang ditunjukkan OPD di lingkungan Pemkab Badung tetap maksimal.

"Kinerja jangan sampai

surut dan berkurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, nantinya kami juga harus sama-sama membenahi dan memperbaiki beberapa hal yang memerlukan perbaikan lebih lanjut," ungkap Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjoe Kumolo mengatakan, kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah tahun 2020 merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.

Kegiatan tersebut juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya.

(adv)

Badung Mulai Percontohan Pembelajaran Tatap Muka Pada Mei

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, akan memulai percontohan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di wilayah Kecamatan Petang, Badung, pada bulan Mei mendatang.

"Kecamatan Petang akan kami jadikan percontohan sekaligus akan mengoreksi kekurangan dan kelemahan dari kami maupun karena cenderung perilaku masyarakat agar tidak terjadi klaster baru," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Rabu.

Menurutnya, dijadikannya wilayah Kecamatan Petang sebagai percontohan Pembelajaran Tatap Muka di masa pandemi COVID-19 itu karena penduduknya tidak terlalu tinggi serta risikonya kecil.

Pihaknya juga telah menjalankan peninjauan ke lapangan untuk memastikan pada bulan Mei wilayah Kecamatan Petang siap untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka.

Wabup Suiasa menjelaskan, pihaknya juga berencana pada bulan Juli mendatang akan memulai Pembelajaran Tatap Muka di seluruh zona hijau dan kuning.

"Skenario kami, opsi satu tetap Petang akan kami buka setelah vaksin kedua selesai di bulan April. Diperkirakan bulan Mei sudah akan belajar dan pada bulan Juni pembelajaran tatap muka sudah bisa dilaksanakan di Kabupaten Badung sambil kita evaluasi," katanya.

Sementara itu, Plt. Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Badung, I Made Mandi mengatakan, kesiapan percontohan pembelajaran tatap muka di Badung secara materi di lapangan sudah siap namun masih menunggu pemberian vaksin kedua khususnya bagi

para guru.

"Kemungkinan awal Juli sepenuhnya dilakukan PTM atau boleh juga sesuai saran Menteri setelah divaksin dua kali diperlihatkan pemerintahan daerah memberikan pilihan pembelajaran, boleh PTM dan boleh juga daring sesuai persetujuan orangtua," ujarnya.

Camat Petang I Wayan Darma

menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi dengan tim dari unsur kesehatan yakni Puskesmas Petang 1 dan Petang 2 serta pihak Kepolisian, Koramil, Satpol PP, progres kesiapan pembelajaran tatap muka di wilayah itu sudah mencapai 96 persen.

Menurut dia tenaga pendidikan guru dan pegawai semuanya sudah mendapatkan vaksin. Apabila masih ada yang belum mendapatkan, juga akan diberikan jadwal sampai tanggal 3 Mei mendatang. (adv)



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Dinas PUPR Badung Akan Tata "Fiber Optic" Bawah Tanah

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, Bali, akan melakukan penataan sarana utilitas terpadu fiber optic bawah tanah yang akan dilakukan bersama-sama jaringan listrik maupun PDAM terpadu. Penataan tersebut juga dilaku-

kan dengan penataan kabel yang masih menggantung dan melintang di sepanjang jalan kawasan pariwisata Badung.

"Dengan konsep ini, Badung bisa mempertahankan ekosistem, keindahan dan keasrian daripada kelestarian Bali itu sendiri dengan modernisasi yang kami kembangkan di bawah tanah, serta menambah estetika wilayah," ujar Kepala Dinas PUPR Badung, IB Surya Suamba di Mangupura, Rabu.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 19 tahun 2016 tentang Jaringan Utilitas Terpadu, Badung secara resmi tidak mengeluarkan

lagi untuk penempatan jaringan utilitas dimana konsepnya merupakan efisiensi untuk semua.

Hingga saat ini, utilitas masih berjalan sendiri-sendiri dengan masing-masing operator yang bergerak sendiri akibat kemajuan dan permintaan pasar fiber optic. Namun, hal tersebut belum dibarengi dengan penempatan atau infrastruktur yang memadai berkaitan dengan masalah kabel tersebut.

"Pada tahun 2019 lalu kami membuat pilot project yang telah dilakukan penurunan kabel dan pemasangan di dalam tunnel utilitas terpadu bawah tanah. Kami sampai saat ini tidak mengizinkan pemasangan kabel-kabel di atas, dari perwakilan pihak operator menyanggupi melaksanakan pembangunan secara bersama yaitu menempatkan kabel di

bawah," katanya.

Menurut Surya Suamba, nantinya setelah semua kabel diturunkan, akan disiapkan peraturan daerah yang akan mengatur retribusi dari pemasangan utilitas di dalam tunnel atau terowongan.

"Kami sedang menyusun Perumda infrastruktur dan kami targetkan menurut arahan pimpinan kami, pertengahan tahun 2022," ungkapnya.

Nantinya, apabila masih ada yang melanggar, tiang-tiang yang melanggar akan dicabut secara paksa untuk memaksa pemilik utilitas yang bandel untuk segera menurunkan utilitas miliknya.

"Target kami adalah bagaimana kabel-kabel yang sudah terpasang di atas ini akan kami hilangkan tanpa melihat siapa saja yang punya kabel tersebut," ujar Surya Suamba. (Adv)



Kepala Dinas PUPR Badung, IB Surya Suamba. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Kemendagri Apresiasi Komitmen Badung Pada Digital Teknologi

KASUBDIT Fasilitas Kawasan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gensly mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Badung terhadap digital teknologi yang sangat kuat.

"Digital teknologi bisa terwujud, tergantung political will dari kepala daerah, good will dari OPD. Kalau ini bisa dilakukan akan mudah mewujudkan smart city," ujar Gensly saat mengunjungi Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengusulkan 15 daerah baru untuk masuk piloting areal smart city network ke ASEAN. Bersama dengan Badan Standar Nasional, pihaknya juga sudah menyiapkan regulasi sehingga daerah-daerah punya labeling.

Menurutnya, pola digital teknologi saat ini dengan adanya dampak pandemi COVID-19 juga memiliki nilai plus dan minusnya.

"Sebenarnya untuk digital teknologi ini, smart city ada SNI-nya, berbasis ISO 37120. Daerah-daerah ini yang telah ber ISO sehingga ada standar dan pakem-pakem yang disiapkan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, kehadiran Kasubdit Fasilitas Kawasan Perkotaan Ditjen Adwil itu tentunya akan dapat lebih mendorong Pemkab Badung dalam melaksanakan transformasi teknologi.

Menurutnya, Pemkab Badung terus berkomitmen terkait dengan pengembangan teknologi sehingga pihaknya juga terus mendorong perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah dalam tata kelola berbasis digital yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara internasional dalam pengelolaan digitalisasi.

Ia menambahkan Pemkab Badung juga telah membuat program jaringan internet yang



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) saat menerima Kasubdit Fasilitas Kawasan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Gensly beserta rombongan di Puspem Badung, Rabu (28/4). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

dapat diakses secara gratis, yang telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di Badung."

"Kami yakin dengan pengembangan teknologi berbasis digital akan memudahkan pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Badung IGN Jaya Saputra menjelaskan saat ini program jaringan Wi-Fi gratis di Badung sudah masuk ke tingkat rumah tangga sebanyak 1.500 titik. (adv)

Badung Jaga Iklim Investasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kedua kiri) saat kegiatan penandatanganan nota kesepakatan dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A Dr H Sobandi SH MH, Kajari Badung Ketut Maha Agung dan Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi di Puspem Badung, Rabu (28/4). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, siap melakukan pengawasan investasi di Badung sebagai salah satu upaya untuk menciptakan dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penandatanganan nota kes-

epakatan pengawasan investasi dilakukan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi, Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Ketut Maha Agung dan Kepala Kepolisian Resor Badung AKBP Roby Septiadi.

"Ini bentuk komitmen bersama

dalam mensukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo guna menciptakan dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif," ujar Bupati Giri Prasta di Mangupura, Rabu.

Pemkab Badung berkomitmen dalam menindaklanjuti konsep pelayanan publik kepada masyarakat terkait terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain dengan Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Badung, kerja sama pengawasan investasi juga dilakukan dengan Polres Badung terkait pengamanan investasi ini.

Giri Prasta menjelaskan, pada era teknologi digital saat ini, terjadi perubahan paradigma proses pengurusan perijinan dari sistem konvensional ke sistem daring sehingga pihaknya membutuhkan suatu perlindungan.

"Diharapkan, pihak pengadilan, kejaksaan dan kepolisian bisa memberikan garansi kepada

mereka-mereka yang akan berinvestasi di Badung. Kami terbuka dengan investasi tapi jangan sampai memarginalkan masyarakat sekitar karena masyarakat kami harus menjadi tuan di rumahnya sendiri," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Ketut Maha Agung menjelaskan, pihaknya memiliki komitmen dalam mendukung dan memberikan kepastian hukum dalam pengawasan investasi di Kabupaten Badung.

"Semoga dengan kolaborasi ini memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kabupaten Badung dalam rangka mendorong terwujudnya visi Bapak Presiden menjadikan Indonesia Maju," ujarnya.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu pelayanan publik yang berkaitan dengan pengadilan bagi masyarakat Badung. (adv)

Ombudsman Bali Pantau UTBK-SBMPTN Undiksha Singaraja



Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) gelombang kedua tahun 2021 di Undiksha Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, mendapatkan pemantauan langsung dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di kampus setempat, Kamis (29/4). (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

UJIAN Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) gelombang kedua 2021 di Undiksha Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, mendapatkan pemantauan langsung dari Ketua Ombudsman Republik Indone-

sia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab.

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., di Singaraja, Kamis, mengatakan UTBK-SBMPTN gelombang kedua berlangsung 26 April hingga 2 Mei 2021 dengan pendaftar

sebanyak 1.627 orang, yang terdiri atas bidang saintek, soshum, dan campuran.

Undiksha sebelumnya juga melaksanakan ujian gelombang pertama pada 16 sampai 18 April 2021 dengan jumlah pendaftar 611 orang. Peserta ini tidak hanya berasal dari Bali, tetapi juga luar Bali.

Undiksha menyiapkan sembilan ruangan yang berada di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Bahasa dan Seni.

Menurut Jampel, Undiksha sebagai salah satu perguruan tinggi sepakat agar calon-calon mahasiswa bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik, karena itu pelaksanaan UTBK perlu pengawasan yang lengkap dengan mengundang Ombudsman.

Undiksha juga melakukan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Hal ini sebagai bentuk komitmen sebagaimana

yang diamanatkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) agar ujian ini dapat terlaksana dengan baik dan ketat.

"Di Undiksha ini, tetap berkomitmen agar benar-benar bisa melaksanakan UTBK sebagaimana yang diamanatkan oleh LTMPPT dengan baik dan ketat, termasuk juga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Intinya adalah kita nantinya bisa memiliki calon-calon mahasiswa yang bisa menyelesaikan studinya dan menjadi SDM yang unggul untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.

Pelaksanaan ujian, kata Prof Jampel sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Artinya, peserta sudah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan elemen Undiksha.

Selain itu juga belum ditemukan pelanggaran prosedur yang dapat merusak citra pelaksanaan UTBK di Undiksha. Dari aspek teknis juga tidak terjadi kendala. (ant)

Peragaan Busana Kebaya di Pantai Kuta

Model memperagakan busana kebaya di Pantai Kuta, Badung, Bali, Jumat (16/4/2021). Peragaan busana kebaya tersebut dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Kartini serta mempromosikan kebaya sebagai pakaian yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebagai upaya melestarikan busana kebaya. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf



Bupati Gianyar Luncurkan Air Mineral Dalam Kemasan Produksi Perumda



Bupati Gianyar Bali, I Made Mahayastra menunjukkan air mineral dalam kemasan produk lokal. ANTARA/HO-Humas Kabupaten Gianyar

BUPATI Gianyar Bali I Made Mahayastra meresmikan sekaligus meluncurkan air mineral dalam kemasan produksi Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani di lokasi wisata Taman Nusa, Banjar Blahpane, Desa Sidan, sekaligus sebagai tempat diadakannya Gianyar Food Festival atau Giffest.

"Ini produk air minum dalam

kemasan Be Gianyar Mineral Water produksi Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani," kata Bupati Gianyar sambil menunjukkan kemasan air mineral saat peluncuran berkaitan dengan perayaan HUT ke-250 Kota Gianyar.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra merasa sangat berbahagia dan bangga, satu harapan dan

cita-citanya tercapai, sesuai dengan visi dan misi selaku Bupati Gianyar, untuk memiliki pabrik air minum dalam kemasan dapat terwujud. Pabrik air mineral yang dibangun, merupakan terbesar yang dimiliki pemerintah kabupaten Gianyar, dengan menggunakan peralatan produksi teknologi terkini, katanya dalam siaran pers Diskominfo Pemkab Gianyar, Selasa,

Peralatan pabrik air yang dibangun, telah mendapatkan Sertifikat Pemeriksaan Sarana baru menuju Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB dengan kategori nilai Baik Sekali (A) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI serta Ijin Edar atau MD, tambah Bupati.

Acara peluncuran dihadiri Deputy Pengawas Pangan Olahan BPOM Rita Endang, yang pada kesempatan tersebut menyerahkan sertifikat izin edar atau MD dan Sertifikat Produk Penggunaan

Tanda SNI.

Ketua Panitia I Gede Widarma Suharta mengatakan pabrik air mineral didirikan murni dari ide cemerlang Bupati Gianyar, dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani. Produk ini memanfaatkan mata air Belahan Paras, mata air yang disucikan oleh Krama Desa Adat Bukian.

Kualitasnya sudah diuji di laboratorium, dan air yang dihasilkan terkategori air siap minum. Prosesnya menggunakan teknologi nanofiltrasi untuk pengaturan rasa dan komposisi mineral, sehingga rasanya akan berbeda dengan produk sejenis. Pabrik air minum dilengkapi dengan unit laboratorium tersendiri, yang dikelola oleh tenaga laboratorium yang kompeten, dengan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dari BPOM Denpasar, sehingga kualitas air yang diproduksi, dapat senantiasa terjaga. (ant)

Bupati Tabanan Lepas Ekspor Cokelat Organik Perdana ke Qatar

BUPATI Tabanan I Komang Gede Sanjaya melakukan pelepasan ekspor perdana Cokelat Organik Cau Chocolates Bali sebanyak tiga ton yang dikirim melalui truk kontainer ke Qatar.

Ekspor perdana itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati di depan kantor PT. Cau Coklat Internasional (CCI), Desa Cau, Kecamatan Marga, Tabanan, Senin.

"Kita sangat bangga dengan prestasi ini. Dulu, saya hadir kesini pertama kali meresmikan rumah cokelat disini dan melakukan banyak perbincangan. Saya memiliki keyakinan, rumah cokelat ini akan menjadi terkenal dan terbukti hal itu sampai ekspor ke Qatar. Ini sangat luar biasa. Saya sangat bangga, saya sangat bangga," ujar Bupati Sanjaya.

Bupati Sanjaya mewakili pemkab dan masyarakat Tabanan memberikan apresiasi terhadap PT. CCI ini. "Ide ini menjadi inspirasi bagi pengusaha lainnya

bukan hanya yang bergerak di sektor komoditas cokelat, karena Tabanan memiliki banyak keunggulan komoditas, sehingga Tabanan betul-betul memiliki daya saing yang handal," katanya.

Menurut Sanjaya, kegiatan itu sesuai dengan visi misi Kabupaten Tabanan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani (AUM).

"Kegiatan ini memiliki keunggulan dengan daya saing yang tinggi, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat sejalan dengan visi misi kita di Kabupaten Tabanan," ujar Sanjaya.

Tabanan memiliki potensi yang sangat luar biasa, khususnya di bidang pertanian. Kalau sektor ini lebih dioptimalkan akan sangat menguntungkan seluruh elemen masyarakat di masa pandemi ini.

Namun, pihaknya tidak me-



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melakukan pelepasan ekspor perdana Cokelat Organik Cau Chocolates Bali sebanyak 3 ton yang dikirim melalui truk kontainer ke Qatar. Ekspor perdana itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati di depan kantor PT. Cau Coklat Internasional (CCI), Desa Cau, Kecamatan Marga, Tabanan, Senin (19/4/2021). (Antara/Pande Yudha/2021)

mungkir selama ini masyarakat Tabanan sangat dimanjakan sektor pariwisata, sehingga sektor pertanian tidak betul-betul dioptimalkan.

Bupati Sanjaya mengajak seluruh elemen masyarakat Tabanan, khususnya generasi muda agar

mencintai sektor pertanian. Karena, generasi milenial yang penuh kreativitas dan inovasi mampu mendorong kemajuan sektor pertanian menjadi andalan di Kabupaten Tabanan dan Pemerintah sangat berharap serta menunggu hal itu bisa terwujud. (ant)

Bupati Klungkung Terima Kunjungan Tim Ahli BBRBLPP untuk Kembangkan Nusa Penida

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta menerima kunjungan rombongan staf ahli dari Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) ke Kepulauan Nusa Ceningan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Bupati Klungkung ke Kantor BBRBLPP di Banjar Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Singaraja pada beberapa hari lalu.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada tim ahli Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) yang sudah merespons kunjungan kerja saya beberapa hari lalu dan kini hadir di Nusa Ceningan untuk melakukan survei dan mengidentifikasi lokasi guna memastikan komoditas yang tepat untuk dikembangkan di Nusa Penida," kata Bupati dalam keterangan tertulis yang diterima dari Humas Pemkab Klungkung, Selasa.

Rombongan itu terdiri dari Ir. Ibnu Rusdi, M.P., Drs. Bedjo Slamet, I Gusti N. Permana, S.Pi, M.P. dan Hendra A. Kurniawan. Mereka

diterima Bupati Suwirta di SDN 2 Lembongan (26/4).

Bupati Suwirta menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di laut Nusa Penida.

Menurutnya, jika budidaya ini berhasil maka kebutuhan seafood untuk pariwisata di Nusa Penida tidak perlu didatangkan dari Bali yang mengakibatkan harganya semakin mahal.

Pihaknya juga berharap area mangrove yang berada di Pulau Nusa Ceningan akan berhasil melakukan budidaya Kepiting, Lobster, Kerapu dan Abalone untuk kebutuhan pariwisata di Nusa Penida.

"Hasil dari kunjungan ini semoga dapat ditentukan komoditas yang memungkinkan/cocok guna dikembangkan untuk Demplo maupun untuk budidaya masyarakat, sehingga kebutuhan seafood untuk Pariwisata tidak mesti didatangkan dari luar dan ini merupakan



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima kunjungan rombongan staf ahli dari Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) ke Kepulauan Nusa Ceningan (26/4). (FOTO Antara News Bali/HO-Humas Klungkung/2021)

peluang juga untuk masyarakat kita," tandasnya.

Sementara itu Ketua rombongan tim ahli BBRBLPP, Ir. Ibnu Rusdi, MP, mengatakan dirinya sangat mengapresiasi atas antusiasme dan keseriusan Bupati Suwirta yang secara langsung memimpin jajarannya belajar dan berupaya mengembangkan

potensi laut Nusa Penida.

"Sangatlah jarang ada Bupati yang mau memimpin langsung jajarannya belajar mengenai pengembangan potensi laut, khususnya tentang budidaya ikan laut. Ini merupakan dukungan yang sangat baik bagi pengembangan potensi yang ada di Nusa Penida," ujar Ir. Ibnu Rusdi. (ant)

Ratusan Sekolah di Karangasem Mulai Laksanakan PTM



Bupati Karangasem Gede Dana beserta Sekda Sedana Merta meninjau sebagian dari 383 sekolah di Kabupaten Karangasem, Bali, yang mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terhitung sejak 26 April 2021. (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Karangasem/2021)

SEBANYAK 383 sekolah di Kabupaten Karangasem, Bali, mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terhitung sejak 26 April yang pelaksanaan hari pertama PTM itu langsung ditinjau Bupati Karangasem Gede

Dana beserta Sekda Sedana Merta.

Humas Pemkab Karangasem dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa, melaporkan peninjauan hari pertama PTM itu dilakukan Bupati di beberapa sekolah, guna memastikan Pembela-

jaran Tatap Muka berjalan aman, lancar dan sesuai aturan.

Dengan beberapa kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran ini, sebanyak 383 Sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK yang berada dalam daerah zona hijau melaksanakan PTM dengan memperhatikan batasan 50 persen dari kapasitas ruangan.

"Karena sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya, saya lihat murid menjadi antusias pada PTM hari pertama, tentunya dengan tetap menerapkan prokes yang ketat. Selain itu, PTM ini tentunya juga bertujuan supaya tetap menjaga interaksi dan hubungan sosial dengan sesama temannya," ujar Bupati Gede Dana.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gede Dana juga mengingatkan setiap wali kelas agar serius dalam menjaga prokes setiap mu-

rid dari awal datang hingga pulang, jangan dibiarkan berkerumun, tetap ingatkan mencuci tangan dan menjaga jarak, dan juga pada saat PTM agar hanya dengan penjelasan, sedangkan untuk latihan dan tugas-tugas dikerjakan di rumah.

"Dengan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai dan juga memperhatikan jangkauan akses kesehatan, PTM ini akan tetap dievaluasi setiap minggunya, jika berjalan lancar, tidak ada masalah dan tidak ada yang terkonfirmasi positif, besar harapan kami tentunya meningkatkan PTM dari 50 persen menjadi 75 persen," harapnya.

Bupati Gede Dana juga berharap agar supaya PTM ini menjadi sarana pembelajaran sekaligus pembiasaan di Lembaga Sekolah dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat. (ant)

Dirjen Bimas Hindu Tinjau Sekolah Rintisan di Jembrana

DIREKTORAT Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama RI Tri Handoko Seto, meninjau pembangunan gedung rintisan sekolah Agama Hindu setingkat SMA di Kabupaten Jembrana, Bali.

"Saat ini memang baru dibangun satu kelas, tapi kami minta dipersiapkan perencanaan yang matang untuk gedung lainnya. Dengan perencanaan yang matang, kami bisa mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk dibantu," katanya di Negara, Jembrana, Bali, Jumat.

Saat meninjau pembangunan ruang kelas Utama Widya Pasraman (UWP) Sila Kertha Raharja di Desa Manistutu, Kecamatan Negara, bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba, ia berharap, dari sekolah ini akan tercipta generasi yang unggul dan religius, sehingga mampu bersaing pada dunia kerja dengan berlandaskan karakter agama.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sekolah berbasis

keagamaan termasuk Hindu, akan melahirkan generasi yang berkualitas, dalam berbangsa dan bernegara dengan kemajemukan dan heterogenitas seperti Indonesia.

Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan, meski baru memiliki satu ruang kelas, guru dan murid UWP Sila Kertha Raharja tetap semangat dalam menjalankan dan menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

"Kepada rekan-rekan guru yang bertugas di UWP Sila Kertha Raharja agar tidak hanya fokus kepada mata pelajaran saja, tetapi juga memikirkan membangun Umat Hindu secara makro. Kami yakin para guru Agama Hindu memiliki kemampuan dan wawasan dalam membina umat. Hal ini harus dimanfaatkan dan dioptimalkan," katanya.

Ia juga mengungkapkan, ke depan pembangunan UWP Sila Kerta Raharja Manistutu, tidak lagi kewenangan Pemkab



Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama RI Tri Handoko Seto (tengah) bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba meninjau pembangunan ruang kelas UWP Sila Kertha Raharja yang merupakan sekolah rintisan setingkat SMA dengan berbasis Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, Jumat (23/4). (Antaraneews Bali/Humas Jembrana/2021)

Jembrana karena pendidikannya setingkat SMA.

"Secara aturan Pemkab Jembrana tidak ada wewenang dan tidak dapat memberikan bantuan. Kami sifatnya hanya memberi dukungan semangat dan moral kepada siswanya," katanya.

Namun ia mengaku, sangat bersyukur dengan keberadaan sekolah rintisan itu sehingga

mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jembrana.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten II I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana I Gusti Komang Budi Santika serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jembrana. (ant)

Bangli Perpanjang Pelayanan UHC dengan BPJS Kesehatan



Kantor BPJS Kesehatan di kabupaten Bangli (Adi Lazuardi)

PEMKAB Bangli memperpanjang pelayanan kesehatan universal health coverage atau UHC pada Tahun 2021, sebagai bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi seluruharganya.

"Kami sudah bertemu dengan Bupati Bangli yang baru Sedana Artha dan beliau telah menyatakan komitmen meneruskan, memperpanjang pelayanan UHC dengan BPJS Kesehatan pada tahun ini, walaupun di tengah

kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19," kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak di Bangli, Jumat.

Ia menjelaskan walau pun keuangan Pemkab Bangli sedang sulit akibat pandemi, namun komitmen pemda untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi semua warganya tetap jadi prioritas.

"Itu yang disampaikan Bupati Bangli kepada kami saat bertemu," ucap Kepala BPJS Kesehatan cabang Klungkung, yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Klungkung, Gianyar, Bangli dan Karangasem itu.

Dalam jumpa pers di Bangli itu, Endang mengingatkan bahwa sejak 1 Januari 2021, iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBBU) dan bukan pekerja (BP) untuk kelas III telah naik dari

Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan.

"Namun, peserta masih membayar Rp35.000 per bulan dan pemerintah masih menyubsidi sebesar Rp7.000 per bulan," ujarnya.

Kenaikan ini didasarkan atas Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sejak diterapkan sistem kesehatan Tahun 2014.

Pada Tahun 2020, iuran peserta PBBU, BP dan peserta mandiri kelas 3 sudah disesuaikan menjadi Rp42.000 per bulan. Akan tetapi, pemerintah masih menyubsidi Rp16.500 per bulan dan peserta hanya membayar Rp25.500 per bulan.

Pada Tahun 2021, subsidi pemerintah berkurang dari Rp16.500 per bulan menjadi Rp7.000 per bulan, dan peserta hanya membayar Rp35.000 per bulan. (ant)

Pemkab Buleleng Bangun Pos Sekat di Pejarakan Jelang Mudik

PEMKAB Buleleng, Bali, membangun pos sekat di wilayah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, untuk mengawasi mobilisasi masyarakat dari dan menuju Buleleng terkait dengan Pelarangan Mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah tahun 2021.

Setelah menghadiri Rakor Lintas Sektor Nasional Pengamanan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah tahun 2021 secara daring dari Command Center Polres Buleleng, Rabu, Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menjelaskan, nantinya akan terdapat lima titik penyekatan di Bali. Salah satunya di Buleleng yang akan dibangun di wilayah barat yaitu Desa Pejarakan.

"Kami akan segera melakukan koordinasi lintas instansi seperti dengan TNI dan Polri akan dilakukan tentang hal ini karena sesuai dengan instruksi, pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas penga-

manan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021," jelasnya.

Menurut Sutjidra, penyekatan dilakukan dengan harapan agar masyarakat tidak mudik. Ini dilakukan karena dari paparan instansi pemerintah pusat bahwa terjadi peningkatan kasus yang signifikan saat libur panjang atau libur nasional lainnya. Angka kematian juga meningkat. Umumnya pada masyarakat yang lanjut usia (lansia). Di atas 60 tahun, risiko meninggal 12 kali lebih besar daripada yang usianya di bawah 59 tahun.

"Ini yang diantisipasi kenapa pemerintah membuat aturan untuk tidak mudik pada saat Hari Raya Idulfitri. Demi keselamatan masyarakat. Karena hukum tertinggi di negara kita adalah keselamatan rakyat," ucap Sutjidra.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Buleleng Kopol Anak Agung Wiranata Kusuma seizin Kapolres Buleleng menyebutkan sebelum pelaksanaan



Pemkab Buleleng, Bali, membangun pos sekat di wilayah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, untuk mengawasi mobilisasi masyarakat dari dan menuju Buleleng terkait Pelarangan Mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah tahun 2021. (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

pengamanan Idulfitri, dilakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka sosialisasi larangan mudik tahun 2021. "Kegiatan melibatkan 170 personel yang dimulai dari tanggal 27 April sampai 5 Mei 2021," katanya.

Saat Hari Raya Idulfitri juga

dilaksanakan Operasi Ketupat dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dalam rangka pengamanan. Operasi Ketupat melibatkan 130 personel termasuk yang akan bertugas di pos sekat. Pos Sekat ditentukan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak. (ant)

DPRD Bali Terima Komunitas Cinta Pertanian Indonesia



Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (Foto ANTARA/I Komang Suparta/Ist/2021)

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry menerima Komunitas Cinta Pertanian Indonesia (Petisi 45) terkait upaya membangkitkan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19.

"Ekonomi Bali rentan goyah karena pariwisata menjadi 'leading' sektornya. Dan saat ini terpukul

akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini harus diantisipasi, salah satunya dengan cara menguatkan sektor pertanian. Pemerintah perlu memberi perhatian serius pada sektor pertanian," katanya di Denpasar, Senin.

Sugawa Korry mengatakan semua masukan Petisi 45 akan

dijadikan bahan pembahasan bersama legislatif dengan eksekutif ke depannya, sehingga jalan keluar lebih baik di masa mendatang.

Ia menegaskan, sektor pertanian harus dilindungi, dan dibangkitkan dengan sistem pertanian yang lebih modern. "Pertanian ini harus dilindungi dan dibangkitkan melalui sistem pertanian yang modern menggunakan IT industri pertanian

Politisi Partai Golkar ini juga setuju dengan masukan dari Petisi 45 terkait Perda (Peraturan Daerah) Subak. Namun harus melalui mekanisme, termasuk dalam penganggarannya yang berkaitan dengan pertanian.

"Keberadaan Perda Subak kami setuju melalui mekanisme. Perda itu perlu revisi, karena ada hal-hal yang harus dilakukan perubahan," ucapnya.

Ketua Petisi 45 Nyoman Baska-

ra mengatakan bahwa sektor pertanian akan tetap eksis dalam kondisi apa pun. Karena pertanian sektor primer sampai kapan pun akan tetap eksis.

"Kami yakin sektor pertanian sebagai penyangga kehidupan paling utama, karena itu perlu dibangkitkan dan pemerintah harus memberi peran memajukan sektor ini. Seperti sekarang di Bali sektor pariwisata terkoyak akibat pandemi COVID-19, sehingga masyarakat pun terancam dan lebih optimistis kembali ke sektor pertanian," katanya.

Ia mengatakan, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak warga yang bergelut di sektor pertanian. Pihaknya berharap ada pendampingan yang riil kepada petani, khususnya bagaimana bertani secara efektif. Selain itu, pemerintah perlu membeli hasil pertanian. (ant)

Berawal dari KUR BRI, Ida Ayu Kade Padmi Raih Omzet Hingga Rp25 Juta per Bulan

BERAWAL dari pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI), Ida Ayu Kade Padmi, seorang pengusaha toko kelontong di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali, saat ini berhasil meraih omzet hingga Rp25 juta setiap bulannya.

"Pada tahun 2010, sebelum membuka usaha, awalnya saya hanya memiliki modal Rp2 juta, jumlah tersebut tentu saja sangat minim untuk saya membuka usaha toko kelontong dan hanya cukup membeli sedikit barang saja untuk mengisi toko," ujar Ida Ayu Kade Padmi di Buleleng, Rabu.

Kemudian, toko kelontong yang diberi nama "Toko Ochi" tersebut didatangi oleh tenaga marketing mikro yang dimiliki BRI yaitu Mantri bernama Ibu Agung yang menawarkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat sebagai modal untuk mengembangkan usaha.

Namun, karena pada saat itu Ida Ayu Kade Padmi masih merasa awam dengan dunia per-

bankan dan merasa takut untuk meminjam uang, tawaran KUR Tanpa Jaminan dari Mantri BRI tersebut langsung ia tolak.

"Kemudian saat itu Ibu Agung terus memberikan edukasi kepada saya dan juga memberikan saya semangat hingga akhirnya saya yakin dan berani untuk meminjam uang modal melalui KUR BRI sebesar Rp5 juta pada tahun 2010 lalu. Uang tersebut langsung saya belanjakan banyak barang-barang yang penting agar toko saya ini terlihat penuh dagangannya agar pembeli dapat tertarik datang," kata wanita berusia 47 tahun itu.

Pinjaman sebesar Rp5 juta tersebut ia lunasi dalam jangka waktu satu tahun. Pada saat itu, secara perlahan usaha toko kelontong miliknya juga terus mengalami perkembangan hingga pada tahun 2011 Ida Ayu Kade Padmi kembali meminjam uang sebesar Rp15 juta rupiah melalui KUR BRI sebagai modal usaha.

"Pinjaman tersebut saya ambil



Ida Ayu Kade Padmi melayani pembeli di toko kelontong miliknya. Antaranews Bali/HO/fik

dengan jangka waktu pelunasan selama dua tahun. Selama masa peminjaman, Ibu Agung juga sering datang bertemu dengan saya dan memberikan semangat serta kiat dan saran dalam berusaha," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, usaha toko kelontong yang dimiliki Ida Ayu Kade Padmi semakin berkembang. Setelah pinjaman

sebelumnya lunas, ia juga kembali mendapatkan KUR sebesar Rp20 juta yang ia gunakan untuk merenovasi bangunan tokonya agar semakin besar dan nyaman dalam melayani pembeli.

"Untuk saat ini saya sudah berhasil meraih omzet sekitar Rp25 juta per bulan dengan keuntungan sekitar Rp5 juta setiap bulannya," ujarnya. (ant)

BPJamsostek Gianyar Sudah Layani 1.008 Klaim



Dirut BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo, melakukan langsung penandatanganan MoU bersama dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di Jakarta (Foto Humas)

KEPALA cabang BPJamsostek Gianyar Bimo Prasetyo mengumumkan sejak awal bulan Januari 2021 sampai 31 Maret 2021 telah melayani 1.008 klaim dan menyelesaikannya dengan protokol LAPAK ASIK (Layanan Tanpa Kontak Fisik).

"Dari pelayanan tersebut, besaran klaim yang diserahkan

sejumlah Rp12.408.690.838,10. Jumlah itu terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp11.280.097.403,10, jaminan kecelakaan kerja (JKK) Rp363.682.264,00, jaminan kematian (JKM) Rp678.000.000,00 dan Jaminan Pensiun (JP) Rp86.911.171,00," ujar Bimo dalam keterangan persnya di

Gianyar, Selasa.

Semua klaim dari peserta BPJamsostek dilayani secara daring dan tanpa ada kontak fisik sehingga mampu menekan penyebaran COVID-19 di wilayah kerjanya, tambah dia.

Kacab BPJamsostek Gianyar itu menjelaskan bahwa genap seminggu setelah terbitnya Inpres No 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJamsostek langsung tancap gas dengan menjalin komitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi. Sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) desa, 1.039 pegawai Non-ASN.

Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUM-DES juga ikut terdaftar pada program yang sama.

Sebagai badan penyeleng-

gara, BPJamsostek, lanjut Bimo, memiliki tugas yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja sebagai tugas utamanya. Selain itu, juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga seiring dengan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

Hal ini sudah menjadi tanggung jawab BPJamsostek dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja. "Saya sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek," tegasnya. (ant)

BI Bali Usulkan Tiga Strategi Majukan Pertanian Kabupaten Tabanan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia mengusulkan dan merekomendasikan setidaknya tiga strategi untuk memajukan sektor pertanian di Kabupaten Tabanan sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, dengan mempertimbangkan struktur perekonomian daerah setempat.

"Pada 2020, Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 6,14 persen (yoy)," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Sabtu (24/4).

Dia mengemukakan ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, Produksi Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan didominasi oleh sektor pertanian (23,03 persen) dan pariwisata (17,16 persen).

Kedua sektor juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu, masing-masing sebesar minus 1,20 persen dan minus 24,84 persen.

"Sebelum pandemi COVID-19, perekonomian Kabupaten Tabanan

konsisten tumbuh di atas 5 persen setiap tahun," ucap Trisno.

Oleh karena itu, tiga hal yang direkomendasikan Trisno yakni petani milenial di Kabupaten Tabanan untuk akselerasi modernisasi di sektor pertanian.

Kedua, digitalisasi pertanian di sektor hulu dan hilir untuk meningkatkan produktivitas dan hasil penjualan. Ketiga, hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk dan penyerapan tenaga kerja.

"Untuk mendukung ketiga strategi tersebut agar berjalan efektif, dibutuhkan dukungan regulasi, anggaran, kemudahan berinvestasi, pembiayaan perbankan, serta penguatan kelembagaan



Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam HLM TPID Kabupaten Tabanan belum lama ini (AntaraneWS Bali/HO-BI/2021)

dan pemasaran," ucapnya.

Ia mengatakan belum lama ini telah dilaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan data neraca pangan, Kabupaten Tabanan mengalami defisit (jumlah kebutuhan lebih besar dari produksi) pada tiga komoditas, yakni bawang merah,

bawang putih, dan cabai besar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia mendorong terbentuknya BUMD pangan untuk meningkatkan serapan hasil produksi pertanian, serta kerja sama antar daerah dengan daerah lain, baik intra provinsi maupun antarprovinsi yang mengalami surplus pada ketiga komoditas tersebut. (ant)

PLN Bali Mudahkan Pelaku Pertanian Dengan Program Electrifying Agriculture



PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali mendorong pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk memaksimalkan penggunaan listrik guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya melalui program Electrifying Agriculture sehingga memudahkan masyarakat untuk pengembangan sektor itu. (Foto Antara News Bali/HO-PLN Bali/2021)

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali mendorong pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk memaksimalkan penggunaan listrik guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya melalui program Electrifying Agriculture sehingga

memudahkan masyarakat untuk pengembangan sektor itu.

"Saat ini, Bali memiliki potensi pelanggan pada sektor usaha-usaha tersebut yang dapat dimigrasi dari penggunaan diesel ke penggunaan listrik. Potensi inilah yang akan kami optimalkan," kata Senior Manager Niaga dan Pelay-

anan Pelanggan PLN UID Bali, I Made Suamba, dalam keterangan persnya, Selasa.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, PLN sejak Februari lalu telah meluncurkan program Electrifying Lifestyle bekerja sama dengan Bank BRI dan Mandiri untuk pembiayaan bagi pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.

"Pelaku usaha yang memiliki kendala terhadap permodalan untuk beralih dari mesin diesel ke listrik, bisa mengajukan pinjaman untuk pembiayaan usahanya sebesar Rp250 juta hingga Rp300 juta atau pinjaman skala kecil sebesar Rp20 juta," ungkap Suamba.

Pihaknya menjelaskan banyak keuntungan yang diperoleh dengan bermigrasi dari mesin diesel ke listrik yakni efisiensi dengan menekan biaya produksi hingga 50 persen. Selain itu, mesin

listrik tidak menghasilkan polusi udara, polusi suara serta tidak ada limbah oli seperti mesin diesel sehingga lebih ramah lingkungan.

"Telah dibuktikan bahwa hasil produksi dari mesin listrik ini lebih baik karena motor listrik lebih stabil," jelas Suamba.

Senada dengan Suamba, Bayu, pemilik perkebunan hidroponik terintegrasi dengan kolam lele di Singaraja telah membuktikan bahwa dengan beralih ke mesin berbasis listrik usahanya lebih produktif. Berkat pasokan listrik yang andal, maka hasil panennya lebih stabil dan biaya produksi dapat ia tekan.

"Saat ini, pembelian bahan bakar subsidi sudah semakin dibatasi, sehingga semakin sulit bagi kami untuk memperoleh sumber bahan bakar. Dengan migrasi ke listrik, selain biaya lebih murah, kepastian pasokan listrik selama 24 jam dijamin oleh PLN," ucap Bayu. (ant)